



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



RINGKASAN HARI INI

Kamis, 21 Agustus 2025

Penumpang Kereta Api: Rem Blooming!

Commuter Line Baru Bisa Berhenti 4 Km dari Stasiun

KA BABAS HINGGA DESA SUGIHWARAS



KA Commuter Line berhalte di Stasiun Sidoarjo pada Selasa (19/8) malam. Insidernya terjadi pukul 18.4 WIB insidernya akibat rem blong. KA baru berhalte di Desa Sugihwaras, Candi yang jaraknya sekitar empat kilometer. Laif, salah satu penumpang mengungkapkan, suasana di dalam kereta sangat mencekam. Lampu KA meredup dan mulai menyala-menyala. "Salah satu penumpang. Orang-orang di gerbang depan lari ke belakang. Ada yang teriak-teriak blong" kata penumpang gerbang tiga itu.

Dalam Penyebab
Manajer Humas KAI Dept 8 Lugman Afri Setiawan terlihat menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan penumpang. Sejumlah penumpang kereta api (PKA) langsung berkoordinasi dengan petugas stasiun sekitar insidernya. "Kondisi di dalam kereta sangat mencekam. Lampu KA meredup dan mulai menyala-menyala. "Salah satu penumpang. Orang-orang di gerbang depan lari ke belakang. Ada yang teriak-teriak blong" kata penumpang gerbang tiga itu.

Turun dengan Melompat
KA akhirnya memang tidak berhenti di stasiun yang seharusnya menjadi pemberhentian terakhir tersebut. Laif dan penumpang lain hanya bisa pasang. Hingga KA baru u-dian

BERMASALAH
KA Commuter Line (KAL) yang baru berhalte di Desa Sugihwaras, Candi, ketika penumpang KA sedang menunggu di Stasiun Sidoarjo setelah meredup dan mulai menyala-menyala.

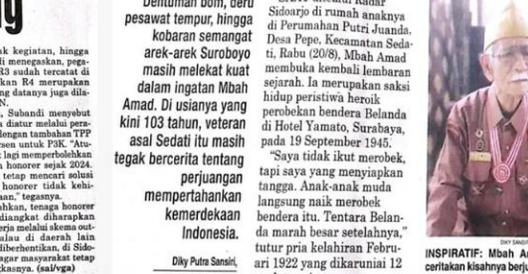


DIBATASI: Para siswa nongkrong di sebuah warung kopi Jalan Dr Cipto Mangun Kusumo kemarin (20/8). Pemkab bakal memberlakukan jam malam.

Pelajar Dilarang Keluar Rumah Pukul 21.00-04.00

Mbah Amad, Veteran 103 Tahun dari Sedati Siapakan Tangga saat Perobekan Bendera Belanda di Hotel Yamato

Dentuman bom, deru pesawat tempur, hingga kobaran semangat arek-arek Surabaya masih melekat kuat dalam ingatan Mbah Amad. Di usianya yang kini 103 tahun, veteran asal Sedati itu masih tegak bercerita tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.



INSPIRATIF: Mbah Amad saat menceritakan kisah perjuangan melawan penjajah.



LEBIH PAGU: Para siswa kelas 1 SDN Candipati 2, Porong, usai mengikuti kegiatan belajar. Selasa (19/8). Dinas Dikbud berkin surut ke Kemendikdasmen terkait kasus kelebihan murid.

Dinas Dikbud Belum Pastikan Sanksi untuk Kedua Sekolah Kelebihan Murid

SIDOARJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo belum bisa memastikan sanksi bagi dua sekolah di Porong yaitu SDN Candipati 2 dan SDN Kesambi yang memasukkan murid melebihi pagu. Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tito Adli mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi ke Pemkab Sidoarjo dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait perkara tersebut. "Kami sudah bersurat (ke Bupati dan Kemendikdasmen) terkait kasus ini", ujarnya kemarin (20/8).

3.843 Tenaga Honorer Jadi P3K, 2.311 Pegawai Dialihkan ke Outsourcing

KOTA-Kabar baik bagi ribuan tenaga honorer di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Subandi, memisahkan 3.843 pegawai yang mengikuti tes BKN dan RI untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Alhamdulillah, seluruh peserta tes BKN dan RI sebanyak 3.843 orang kita angkat menjadi P3K," ujar Subandi usai menyuarakan kecamatan DPRD Sidoarjo, Rabu (20/8). Meski demikian, masih ada 2.311 tenaga honorer yang belum terakomodasi. Status mereka tengah dipertanyakan, meski regulasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) cenderung mengarah ke sistem outsourcing. "Yang 2.311 ini tetap kita upayakan. Sesuai aturan, artinya outsourcing. Tapi untuk peserta tes BKN dan RI, insyaallah semua kita tenaga kontrak kegiatan, hingga kategori R3 sudah tercatat di BKN, sedangkan R4 merupakan peserta tes yang datanya juga dilaporkan ke BKN. Terkait ini, Subandi menyebut akan memenuhinya di luar melalui peraturan bupati, dengan tambahan TPP sebesar 35 persen untuk P3K. "Aturan BKN tidak lagi memperbolehkan pengangkatan honorer sejak 2024. Namun kami tetap memonvori melalui anggaran tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan," tegasnya. "Inisiatifnya, tenaga honorer tetap bisa bekerja melalui skema outsourcing. "Kalau di daerah lain banyak yang diberhentikan, di Sidoarjo kita juga akan masyarakat tetap bekerja," pungkasnya. (ast/vgn)

KARAR BAIK: Bupati Sidoarjo Subandi usai menyuarakan dengan DPRD Sidoarjo. Tenaga kerja yang diangkat P3K berasal dari berbagai kategori, antara lain Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), kontrak SIKEDA, kontrak PKKOM,

Dispindikbud Belum Pastikan Sanksi Kepala Sekolah di Porong

KOTA-Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo, Tito Adli, belum bisa memastikan sanksi bagi kepala sekolah di Kecamatan Candipati yang memasukkan murid melebihi pagu. "Kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo," ujar Adli. "Kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo," ujar Adli. "Kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo," ujar Adli.

Dekat Area Industri, Warga Krian Paling Banyak Terpapar ISPA

SIDOARJO - Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) paling banyak ditemukan di Kecamatan Krian. Salah satu penyebabnya, karena dekat dengan area industri. Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat, total ada 269.423 kasus tersebar di sejumlah Sidoarjo. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo Danang Abdul Ghani mengatakan, Puskesmas Krian menduduki peringkat pertama dengan 72.625 kasus. "Angkanya jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain. Disusul Ganting 23.139 kasus dan Waru 21.078 kasus," ujarnya kemarin (20/8). Menurutnva, kasus ISPA di Sidoarjo

Reklame di Jalan Raya Candi Disegel Satpol PP

SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo menyegel sebuah papan reklame berukuran 6x3 meter di Jalan Raya Candi, Kecamatan Candi. Reklame itu ditertibkan karena diduga tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

Pemkab Pasang 400 Titik PJU Baru

SIDOARJO (EM) - Harapan warga Sidoarjo untuk memiliki jalan umum yang lebih terang dan lebih aman akan segera terwujud. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) telah memasang 400 titik Pencahayaan Jalan Umum (PJU) baru di berbagai titik di Kabupaten Sidoarjo. "PJU yang dipasang memiliki spesifikasi yang lebih baik dan tahan lama," ujar Kepala Dinas DPU-PR, H. M. H. "PJU yang dipasang memiliki spesifikasi yang lebih baik dan tahan lama," ujar Kepala Dinas DPU-PR, H. M. H.

Ratusan Ribu Warga Lerita ISPA, Kasus Terbanyak di Krian

KOTA-Jumlah kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Sidoarjo masih cukup tinggi. Berdasarkan Danang Abdul Ghani, menyebutkan tiga wilayah puskesmas dengan jumlah kasus terbanyak. Yaitu Puskesmas Krian, Gan-



MUSREMBANG PEREMPUNAN: Wakil Bupati Sidoarjo H. M. H. memimpin musrenbang perempuan 2025 yang membahas agenda pembangunan. (Dokumentasi: Asti, dan Kiki) Musrenbang Perempuan 2025 membahas agenda pembangunan. (Dokumentasi: Asti, dan Kiki)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Perjuangkan Program Murid Disabilitas, Komisi D:

Kami Siap Urunan



Sidoarjo, petisi.co – Sulit mendapatkan akses pendidikan, khususnya jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Sederajat masih menjadi kendala utama bagi kelompok Disabilitas. Selain itu minimnya fasilitas penunjang seperti alat bantu belajar membuat siswa difabel kesulitan dalam mencerna pelajaran.

Hal itu terungkap saat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo menggelar hearing (dengar pendapat) dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DPC Sidoarjo, Kamis (14/8/2025). Guna mengurai akar permasalahan tersebut, Komisi D mengundang sejumlah dinas terkait untuk dicarikan solusi.



Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Moch. Dhamroni Chludori, M.Si

Hadir dalam rapat hearing Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni Chludori, M.Si, Wakil Ketua Komisi D, H. Bangun Winarso, Sekretaris Komisi D, Zahlul Yussar, S.I.Kom dan anggota Komisi D, Tarkit Erdianto, S.H, M.H, (PDI-P), H. Usman, M.Kes. (PKB) dan H. Sutadij (PKB). Sementara dari dinas Pemkab Sidoarjo yang hadir yakni Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aries Edy Nugroho, Kepala Seksi (Kasi) pembinaan kelembagaan dan pembinaan pendidikan dasar



Dikbud Nanik Sumarviati, S.Pd, M.Pd, serta Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Nilam Cahyandari Listyowati. Dari pihak HDWI Sidoarjo antara lain Siti Aisyah, Anik PS, Dewi Sekar dan Ni Made Dharmifa, serta dari Gempita ada Yeni Darmawanti dan Pipit Elina S.

Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni Chludori, mengatakan pertemuan hearing ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang disampaikan HWDI cabang Sidoarjo. Dalam surat tersebut, HWDI Sidoarjo ingin menyampaikan ide dan gagasan terkait peningkatan kapasitas ekosistem sekolah untuk mempromosikan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua siswa termasuk murid disabilitas.



Hearing Komisi D DPRD Sidoarjo dengan HWDI DPC Sidoarjo dan Dikbud serta Dinsos

“Dalam rangka memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas ini penting sekali untuk dibahas bersama, makanya kita adakan pertemuan hari ini. Terimakasih HWDI Sidoarjo sudah mengutarakan keinginannya dan Alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Semua yang hadir disini saya yakin sudah pirsó (tahu) nggeh, terkait perda ini?,” tanya Dhamroni mengawali hearing.

Politisi senior asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan Perda Nomor 11 tahun 2024 bertujuan untuk memastikan penyandang disabilitas tidak tersisihkan dan



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua DPRD Sidoarjo Hadiri Rapat Pembahasan Ribuan Tenaga Non-ASN Sidoarjo.



SIDOARJO | LENSAGLOBAL.com - Ketua DPRD Sidoarjo menghadiri rapat yang dilaksanakan Bupati Sidoarjo, Subandi terkait pembahasan nasib ribuan tenaga Non-ASN di Kabupaten Sidoarjo, Rabu (20/8/2025).

Dalam acara ini, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mendukung penuh kebijakan Pemkab Sidoarjo terhadap nasib tenaga Non ASN yang kemarin gagal tes PPPK dari kategori R3 dan R4 diangkat sebagai P3K Paruh Waktu. Dipastikannya pihak legislatif mendukung kebijakan pengusulan pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.

Pihaknya juga akan memastikan tidak ada penghapusan atau pengurangan tenaga non-ASN di Kabupaten Sidoarjo. Semua akan tetap bekerja seperti sebelumnya.

“Alhamdulillah teman-teman dari Pemkab dan DPRD kompak untuk memutuskan hal ini. Kita akan mengawalinya. Karena itu terkait dengan nasib ribuan warga Sidoarjo,” katanya.

Selain dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih dan Bupati Sidoarjo, Subandi juga hadir pula dalam rapat yang digelar di Ruang Delta Wicaksana Setda tersebut, Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin

Bupati Sidoarjo, Subandi memastikan tidak ada PHK terhadap pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Termasuk para tenaga Non-ASN Pemkab Sidoarjo yang kemarin tidak lolos tes penerimaan PPPK Pemkab Sidoarjo, juga tidak akan di-PHK.

Para pekerja itu tidak perlu gusar, karena Bupati Subandi sudah menyatakan bahwa mereka tetap bekerja di instansinya semula.



"Kemarin ada 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang gagal lolos tes PPPK. Seluruhnya akan diangkat Pemkab Sidoarjo sebagai PPPK Paruh Waktu," kata Bupati Sidoarjo Subandi.

Bupati Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak akan melakukan PHK terhadap tenaga Non ASN yang kemarin gagal ikut tes PPPK. Mereka tetap akan bekerja di instansinya masing-masing. Pemkab Sidoarjo akan mengangkat mereka sebagai PPPK Paruh Waktu. Jumlahnya 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang telah masuk data base BKN.

"Yang kemarin ikut tes dari kategori R3 dan R4, akan kita angkat semua sebagai P3K Paruh Waktu," tegas Subandi.

Namun, lanjut bupati, masih ada PR terhadap tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam kategori R3 dan R4. Saat ini masih ada 2.311 orang Non ASN yang tidak masuk kategori tersebut.

Terkait itu, Pemkab Sidoarjo akan mencari alternatif lain terhadap status mereka. Seperti mengalihkan pada skema outsourcing sesuai ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), atau alternatif lainnya.

"Yang tidak kita angkat tidak kita PHK, Cuma kita outsourcing kan, kalau daerah lain ada yang diberhentikan," ucapnya.

Pengangkatan ini dilakukan juga berdasar kebutuhan Pemkab Sidoarjo. Karena setiap tahun, ratusan ASN di Pemkab Sidoarjo memasuki usia pensiun. Pemkab tidak merekrut pegawai baru. Cukup mengambil pegawai non-ASN yang diangkat dari PPPK. Mereka yang sudah menjalani pegawai berstatus R3 dan R4.

Pengangkatan itu sesuai dengan surat dari BKN agar mengangkat pegawai parowaktu. Sesuai data-data yang sudah masuk ke BKN dan BKD. Juga sesuai dengan kemampuan daerah. Batas belanja 30 persen dari APBD untuk belanja pegawai.

Subandi menegaskan bahwa pengangkatan PPPK ini merupakan tindak lanjut surat BKN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dipastikan tidak ada faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi keputusan pengangkatan PPPK ini. Termasuk, jika ada yang mencoba melakukan hal-hal di luar aturan. Misalnya, melakukan pungutan atau yang lain dengan alasan apa pun dan mengatasnamakan siapa pun.

"Kami pastikan tidak ada hal-hal seperti itu. Saya ingin nasib pegawai non-ASN ada kepastian karena mereka sudah lama mengabdikan," tegasnya.(JD/AL/*)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Musrenbang Perempuan 2025, Pemkab Sidoarjo Dorong Pembangunan Responsif Gender



SIDOARJO, SOROTMATA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Mereka ikut terlibat dalam arah kemajuan kota delta.

Untuk itu, perempuan dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Rabu (20/8/2025).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hi. Mimik Idayana ini bertujuan mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025.

Forum ini menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari isu kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, penevelaan fasilitas publik yang ramah perempuan, hingga pemberdayaan ekonomi.

Wabup Mimik menegaskan bahwa keluarga merupakan pondasi utama dalam pembangunan perempuan. "Perempuan hebat Sidoarjo perlu bergerak bersama, dari keluarga hingga masyarakat, agar pembangunan lebih tepat sasaran dan bermanfaat luas," tegasnya.

Mak Mimik juga menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan berkeadilan sosial.

Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.



“Jika perempuan Sidoarjo bersemangat turun langsung, maka banyak persoalan dapat segera diatasi. Musrenbang Perempuan ini bukan sekadar forum usulan, melainkan bukti komitmen bersama dalam pembangunan yang setara.” ujarnya.

Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan Musrenbang Perempuan berfungsi memfasilitasi proses penvelarasan kebutuhan pembangunan dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Usulan yang muncul akan dipadukan dengan rencana kerja perangkat daerah (Renja OPD) dan menjadi bahan pemutakhiran RKPD yang mengacu pada RPJMD.

“Kegiatan ini memastikan aspirasi perempuan benar-benar tercermin dalam prioritas pembangunan daerah. Harapannya, hasil yang dirumuskan mampu menjawab isu-isu strategis sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan.” tutup Heni.

Forum Musrenbang Perempuan 2025 ini dihadiri sejumlah organisasi perempuan, di antaranya Ketua Persatuan Istri DPRD, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Ketua Bhavangkari, Ketua Jalasenastri, Ketua Pia Ardhya Garini.

Kemudian Ketua Ikatan Adhvaksa Dharmakarini, Ketua Dharma Yukti Karini, hingga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sidoarjo. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang turut menjadi narasumber.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, Musrenbang Perempuan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi perempuan dalam mendorong program inovatif yang responsif terhadap kebutuhan perempuan serta berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. (Nuri)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Subandi Pastikan Tidak Ada PHK Terhadap Pegawai Non-ASN di Sidoarjo



Progres jatim.com...Sidoarjo- Bupati Sidoarjo Subandi memastikan tidak ada PHK terhadap pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Termasuk para tenaga Non-ASN Pemkab Sidoarjo yang kemarin tidak lolos tes penerimaan PPPK Pemkab Sidoarjo, juga tidak akan di-PHK.

Para pekerja itu tidak perlu gusar, karena Bupati Subandi sudah menyatakan bahwa mereka tetap bekerja di instansinya semula.

"Kemarin ada 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang gagal lolos tes PPPK. Seluruhnya akan diangkat Pemkab Sidoarjo sebagai PPPK Paruh Waktu," kata Bupati Sidoarjo Subandi usai rapat dengan sejumlah pejabat membahas nasib ribuan tenaga Non ASN Sidoarjo, Rabu (20/8/2025).

Sekda Sidoarjo Fenny Acriyawati, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin juga hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Delta Wicaksana Sekda Sidoarjo tersebut.

Bupati Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak akan melakukan PHK terhadap tenaga Non ASN yang kemarin gagal ikut tes PPPK. Mereka tetap akan bekerja di instansinya masing-masing. Pemkab Sidoarjo akan mengangkat mereka sebagai PPPK Paruh Waktu. Jumlahnya 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang telah masuk data base BKN.

"Yang kemarin ikut tes dari kategori R3 dan R4, akan kita angkat semua sebagai P3K Paruh Waktu," tegas Subandi.

Namun, lanjut bupati, masih ada PR terhadap tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam kategori R3 dan R4. Saat ini masih ada 2.311 orang Non ASN yang tidak masuk kategori tersebut.

Terkait itu, Pemkab Sidoarjo akan mencari alternatif lain terhadap status mereka. Seperti mengalihkan pada skema outsourcing sesuai ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), atau alternatif lainnya.

"Yang tidak kita angkat tidak kita PHK. Cuma kita outsourcing kan, kalau daerah lain ada yang diberhentikan," ucapnya.

Pengangkatan ini dilakukan juga berdasar kebutuhan Pemkab Sidoarjo. Karena setiap tahun, ratusan ASN di Pemkab Sidoarjo memasuki usia pensiun. Pemkab tidak merekrut pegawai baru. Cukup mengambil pegawai non-ASN yang diangkat dari PPPK. Mereka yang sudah menialani pegawai berstatus R3 dan R4.

Pengangkatan itu sesuai dengan surat dari BKN agar mengangkat pegawai paruh waktu. Sesuai data-data yang sudah masuk ke BKN dan BKD. Juga sesuai dengan kemampuan daerah. Batas belanja 30 persen dari APBD untuk belanja pegawai.

Subandi menegaskan bahwa pengangkatan PPPK ini merupakan tindak lanjut surat BKN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dipastikan tidak ada faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi keputusan pengangkatan PPPK ini. Termasuk, jika ada yang mencoba melakukan hal-hal di luar aturan. Misalnya, melakukan pungutan atau yang lain dengan alasan apa pun dan menatasnamakan siapa pun. "Kami pastikan tidak ada hal-hal seperti itu. Saya ingin nasib pegawai non-ASN ada kepastian karena mereka sudah lama mengabdikan," tegasnya.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mendukung penuh kebijakan Pemkab Sidoarjo terhadap nasib tenaga Non ASN yang kemarin gagal tes PPPK. Dipastikannya pihak legislatif mendukung kebijakan penyesuaian pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.

Pihaknya juga akan memastikan tidak ada penghapusan atau pengurangan tenaga non-ASN di Kabupaten Sidoarjo. Semua akan tetap bekerja seperti sebelumnya.

"Alhamdulillah teman-teman dari Pemkab dan DPRD kompak untuk memutuskan hal ini. Kita akan mengawalinya. Karena itu terkait dengan nasib ribuan warga Sidoarjo," katanya. (GUS)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ ■ **Diduga tanpa izin**

Reklame di Jalan Raya Candi Disegel Satpol PP

SATPOL PP Kabupaten Sidoarjo menyegel sebuah papan reklame berukuran 6x3 meter di Jalan Raya Candi, Kecamatan Candi. Reklame itu ditertibkan karena diduga tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat.

“Begitu ada informasi reklame baru berdiri di Raya Candi, tim langsung turun. Hasil identifikasi menunjukkan reklame tersebut tidak memiliki izin resmi, sehingga kami ambil tindakan tegas,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi fisik reklame juga menunjukkan baru saja didirikan. Cat pada tiang masih terlihat baru, sementara cor pondasi tiang masih basah dan belum kokoh.

Dalam penindakan, Satpol PP menerjunkan satu pleton tim reklame beranggotakan tujuh personel. Langkah yang dilakukan mulai

Reklame di Jalan...

dari penyampaian Surat Peringatan Pertama (SP1), pemasangan banner bertuliskan “Reklame Ini Dalam Pengawasan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo”, penempelan stiker pelanggaran perda, hingga

Mbah Amad, Veteran 103 Tahun dari Sedati

Siapkan Tangga saat Perobekan Bendera Belanda di Hotel Yamato

Dentuman bom, deru pesawat tempur, hingga kobaran semangat arek-arek Suroboyo masih melekat kuat dalam ingatan Mbah Amad. Di usianya yang kini 103 tahun, veteran asal Sedati itu masih tegak bercerita tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Diky Putra Sansiri,
Wartawan Radar Sidoarjo

SAAT ditemui Radar Sidoarjo di rumah anaknya di Perumahan Putri Juanda, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Rabu (20/8), Mbah Amad membuka kembali lembaran sejarah. Ia merupakan saksi hidup peristiwa heroik perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, pada 19 September 1945.

"Saya tidak ikut merobek, tapi saya yang menyiapkan tangga. Anak-anak muda langsung naik merobek bendera itu. Tentara Belanda marah besar setelahnya," tutur pria kelahiran Februari 1922 yang dikaruniai 12 anak tersebut.



INSPIRATIF: Mbah Amad saat ceritakan kisahnya berjuang melawan penjajah.

Mbah Amad menegaskan, pemuda adalah urat nadi perjuangan. "Jangan lupa sama rakyat kecil dan anak-anak muda. Karena dulu yang berjuang adalah anak muda," pesannya.

Ia juga masih mengingat peran besar Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Suroboyo di medan laga. "Kalau Bung Tomo tidak memberi semangat, mungkin kurang semangat. Bung Tomo berdiri paling depan sambil bertakbir, waktu pertempuran di Kapas Krampung," kenangannya.

Perlawanan sengit di

Surabaya kala itu memaksa para pejuang mundur ke arah barat daya. Mereka bergerak melewati Sepanjang, Krian, Mojokerto hingga pedalaman hutan Nganjuk pada 1947-1948. Kehidupan gerilya penuh keterbatasan. "Tidak ada nasi, setiap hari makan pisang, ubi, buah, sampai daun jati muda," ucapnya.

Namun, kisah paling kalam terjadi di Desa Karangsemi, Kecamatan Gondang, Nganjuk. Ia bersama empat pejuang lain tertangkap Belanda dan dipenjarakan di Kalisosok,

● Ke Halaman 10

erjo @ radarsidoarjo

layout: hadi

**RADAR**
SIDOARJO.ID

Siapkan Tangga...

Surabaya. Empat bulan ditawan, ia menyaksikan sahabat seperjuangannya, Kamdan, dibunuh dengan cara mengenaskan.

"Kalau teringat masa itu, saya benar-benar enggak tega," ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Atas pengabdianannya, Mbah Amad menerima Bintang Kehormatan Perang Gerilya. Ia juga pernah

**RADAR**
SIDOARJO.ID

Dispendikbud Belum Pastikan Sanksi Kepala Sekolah di Porong

KOTA-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo belum memastikan sanksi terhadap dua kepala sekolah di Kecamatan Porong yang kedapatan menerima siswa baru melebihi pagu. Dua sekolah tersebut yakni SDN Candipari II dan SDN Kesambi.

Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirta Adi, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Pemkab Sidoarjo dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). "Kami sudah bersurat ke Bupati dan Kemendikdasmen terkait kasus ini," ujarnya, Rabu (20/8).

Meski begitu, Tirta menegaskan sudah memberikan teguran keras kepada kedua kepala sekolah karena dianggap lalai dalam mematuhi aturan pagu penerimaan siswa baru. "Kami tegur setelah monitoring menemukan adanya lebih siswa," katanya.

Dari hasil pemeriksaan, terdapat 26 siswa yang ti-



HANYA DITEGUR: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Tirta Adi (tengah) saat meminta klarifikasi dari Kepala SDN Candipari II, Susanto (kiri).

dak tercatat dalam sistem SPMB online. Rinciannya, 14 siswa di SDN Candipari II dan 12 siswa di SDN Kesambi. Saat ditanya soal

dugaan siswa diloloskan langsung oleh kepala sekolah, Tirta enggan berkomentar banyak. "Bisa jadi diterima kepala sekolah,

kami baru tahu setelah monv dan cek data," jelasnya. Ia menambahkan, yang terpenting saat ini adalah memastikan hak siswa un-

tuk tetap bersekolah. "Yang terpenting, siswa tetap bisa belajar, meski beberapa harus pindah sekolah," pungkasnya. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

3.843 Tenaga Honorer Jadi P3K, 2.311 Pegawai Dialihkan ke Outsourcing

KOTA-Kabar baik bagi ribuan tenaga honorer di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo, Subandi, memastikan 3.843 pegawai yang mengikuti tes R3 dan R4 resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Alhamdulillah, seluruh peserta tes R3 dan R4 sebanyak 3.843 orang kita angkat menjadi P3K," ujar Subandi usai musyawarah bersama DPRD Sidoarjo, Rabu (20/8).

Meski demikian, masih ada 2.311 tenaga honorer yang belum terakomodasi. Status mereka tengah diperjuangkan, meski regulasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) cenderung mengarah ke sistem outsourcing. "Yang 2.311 ini tetap kita upayakan. Sesuai aturan, arahnya outsourcing. Tapi untuk peserta tes R3 dan R4, insyaallah semua kita



KABAR BAIK: Bupati Sidoarjo Subandi usai musyawarah dengan DPRD Sidoarjo.

angkat," jelasnya.

Tenaga kerja yang diangkat P3K berasal dari berbagai kategori, an-

tera lain Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), kontrak SEKDA, kontrak PPKOM,

tenaga kontrak kegiatan, hingga TKSK. Subandi menegaskan, pegawai kategori R3 sudah tercatat di BKN, sedangkan R4 merupakan peserta tes yang datanya juga dilaporkan ke BKN.

Terkait gaji, Subandi menyebut mekanismenya diatur melalui peraturan bupati, dengan tambahan TPP sebesar 35 persen untuk P3K. "Aturan BKN tidak lagi memperbolehkan pengangkatan honorer sejak 2024. Namun kami tetap mencari solusi agar tenaga honorer tidak kehilangan pekerjaan," tegasnya.

Ia menambahkan, tenaga honorer yang belum diangkat diharapkan tetap bisa bekerja melalui skema outsourcing. "Kalau di daerah lain banyak yang diberhentikan, di Sidoarjo kita jaga agar masyarakat tetap bekerja," pungkasnya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ratusan Ribu Warga Derita ISPA, Kasus Terbanyak di Krian

KOTA-Jumlah kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Sidoarjo masih cukup tinggi. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, sepanjang tahun ini tercatat 269.423 kasus.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sidoarjo,

Danang Abdul Ghani, menyebutkan tiga wilayah puskesmas dengan jumlah kasus terbanyak. Yaitu Puskesmas Krian, Ganting, dan Waru.

“Kasus tertinggi ada di wilayah Puskesmas Krian dengan 72.625 kasus, disusul Ganting 23.139 kasus, dan Waru 21.078

● Ke Halaman 10



Ratusan Ribu Warga...

kasus,” jelasnya, Rabu (20/8).

Ia menambahkan, kelompok usia dewasa (19–59 tahun) menjadi yang paling banyak mengalami ISPA. Faktor





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Pasang 400 Titik PJU Baru

SIDOARJO (BM) - Harapan warga Sidoarjo untuk memiliki jalan umum yang lebih terang dan lebih aman akan segera terwujud. Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan akan memasang 400 titik PJU (penerangan jalan umum) di berbagai wilayah.

PJU tersebut sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan karena jalan gelap maupun jalan rusak, sekaligus mencegah terjadinya kriminalitas.

Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikakan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk memberikan rasa aman dan keselamatan untuk warga

Sidoarjo yang melintas di jalan yang selama ini kurang terang. "Kami ingin warga yang bepergian tengah malam, atau mau berbelanja ke pasar bisa lebih aman, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga," ucap Bupati Subandi, Rabu (20/8).

Menurut Subandi, upaya penambahan titik baru PJU merupakan bagian dari program berkelanjutan yang dilakukan setiap tahun. Dia ingin semua jalan di Sidoarjo dapat terpasang PJU yang memadai. "Kami berupaya setiap tahun ada penambahan titik PJU, terutama di beberapa titik daerah

perbatasan yang sudah mulai ramai," ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo, Benny Airlangga mengatakan saat ini rencana pemasangan PJU memasuki tahap lelang. "Saat ini sudah di lelang PBJ. Dan kami berharap proses lelang berjalan dengan lancar sehingga bisa segera dilaksanakan pemasangan PJU," ungkapnya.

Pembangunan PJU di eks kawedanan Porong senilai Rp 2,6 miliar, eks kawedanan Sidoarjo Rp 1,3 miliar, eks kawedanan Taman Rp 4,3 miliar dan eks kawedanan Krian sebesar Rp 2,6 miliar. (udi)



THE JUSTICE NEWSPAPER'S LEADER
Berita Metro



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



BM1ST

MUSRENBANG PEREMPUAN: Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana saat membuka Musrenbang Perempuan 2025 yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (20/8).

Musrenbang Perempuan 2025, Pemkab Dorong Pembangunan Responsif Gender

SIDOARJO (BM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Mereka ikut terlibat dalam arah kemajuan kota delta.

Untuk itu, perempuan dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan 2025 yang digelar

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (20/8).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana ini bertujuan mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025. **(udi)**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

3.843 Non ASN Sidoarjo akan Diangkat P3K Paruh Waktu

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang gagal lolos tes PPPK, seluruhnya akan diangkat Pemkab Sidoarjo sebagai PPPK Paruh Waktu. Demikian tegas Bupati Sidoarjo, Subandi, Rabu (20/8) kemarin, di ruang rapat delta wicaksana Setda Sidoarjo.

Hadir dalam rapat itu, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin. "Yang kemarin ikut tes dari kategori R3 dan R4, akan kita angkat semua sebagai P3K Paruh Waktu," lanjut Subandi.

Para pegawai tersebut, tidak perlu gusar, mereka akan tetap bisa bekerja di instansinya semula.

Pemkab Sidoarjo tidak akan memPHK mereka. Menurut Subandi, sebanyak 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo itu telah masuk data base BKN.

Namun diakui, masih ada pekerjaan rumah bagi Pemkab Sidoarjo, karena saat ini masih ada tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam kategori R3 dan R4. Jumlahnya ada 2.311 orang.

Terkait itu, Pemkab Sidoarjo akan mencari alternatif lain terhadap status mereka. Seperti mengalihkan pada skema outsourcing sesuai ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau alternatif lainnya. "Di Kabupaten Sidoarjo, cuma



ali kusyanto/bhirawa

Bupati Sidoarjo, Subandi.

dioutsourcinkan, kalau daerah lain ada yang diberhentikan," katanya.

Pengangkatan pegawai dengan skema itu dilakukan karena kebutuhan Pemkab Sidoarjo, yang setiap tahun, ratusan ASN di Pemkab Sidoarjo memasuki usia pensiun.

"Pemkab tidak merekrut pegawai

baru. Cukup mengambil pegawai non-ASN yang diangkat dari PPPK. Mereka yang sudah menjalani pegawai berstatus R3 dan R4," ujarnya.

Pemkab Sidoarjo juga tidak merekrut pegawai baru dalam beberapa tahun ini, karena mengukur dengan kemampuan daerah, yakni

belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari APBD.

"Alhamdulillah Pemkab dan DPRD kompak untuk memutuskan hal ini. Kita akan mengawalinya. Karena itu terkait dengan nasib ribuan warga Sidoarjo," kata Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasich. [kus.dre]

HARIAN
Bhirawa

Wala Sajat Bhiru Walaud



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua Komisi D DPRD Dorong PT Aneka Usaha Jadi “Bulognya” Sidoarjo



Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori,
saat ditemui. (Foto: Teddy Syah/BN.com)

SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, mendorong PT Aneka Usaha untuk mengambil peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo. Ia mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut bisa berfungsi layaknya “Bulog”-nya Sidoarjo.

Menurut Dhamroni, langkah ini penting agar hasil panen petani lokal terserap maksimal. Dengan begitu, harga gabah dan beras di tingkat petani bisa stabil serta terjangkau bagi masyarakat luas.

“Ketahanan pangan itu dimulai dari situ. Tidak perlu beli dari luar daerah. Kalau gabah petani kita dibeli semua, harga beras bisa stabil dan terjangkau,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Ia menilai PT Aneka Usaha berpotensi menjadi penyangga pangan. Perusahaan ini diharapkan membeli langsung seluruh hasil panen gabah dari petani Sidoarjo.

Dhamroni menambahkan, langkah tersebut tidak hanya menjamin stabilitas harga, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan petani di daerah.

Politisi asal Fraksi PKB itu mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, koordinasi antara Dinas Pertanian dan PT Aneka Usaha harus segera dilakukan.

“Saya juga sampaikan agar dilakukan evaluasi di PT Aneka Usaha. Salah satu bidang yang bisa digarap adalah membeli beras langsung dari masyarakat petani,” tegasnya.

Ia menyebutkan, usulan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang menjadi perhatian serius Komisi D DPRD Sidoarjo.



Dhamroni berharap ide tersebut bisa diwujudkan secara konkret sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin dan petani tidak lagi merugi karena hasil panennya tidak terserap pasar.



Sementara itu, Direktur PT Aneka Usaha yang juga jabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Budi Basuki, menilai usulan tersebut memang menarik. Namun, ia menegaskan pihaknya selaku BUMD tidak bisa bergerak leluasa tanpa kajian mendalam.

“Usulan yang bagus, tapi kita BUMD belum bisa bergerak leluasa. Misalnya ada inovasi bisnis baru, harus kita kaji terlebih dahulu,” ujarnya, Kamis, (21/8/2025).

Budi menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan kajian bisnis terkait kemungkinan PT Aneka Usaha menjadi penyangga pangan daerah.

“Memang menarik, tapi dari segi bisnis dan kondisi keuangan Aneka Usaha perlu kita kaji terlebih dulu,” pungkasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Dipastikan Bupati Subandi Tidak Ada PHK Non-ASN



Sidoarjo. Arjunanusantaranews.com, – Sidoarjo Dipastikan Bupati Subandi Tidak Ada PHK Non-ASN. Bupati Sidoarjo Subandi memastikan tidak ada PHK terhadap pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Termasuk para tenaga Non-ASN Pemkab Sidoarjo yang kemarin tidak lolos tes penerimaan PPPK Pemkab Sidoarjo, juga tidak akan di-PHK.

Para pekerja itu tidak perlu gusar, karena Bupati Subandi sudah menyatakan bahwa mereka tetap bekerja di instansinya semula.

“Kemarin ada 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang gagal lolos tes PPPK. Seluruhnya akan diangkat Pemkab Sidoarjo sebagai PPPK Paruh Waktu,” kata Bupati Sidoarjo Subandi usai rapat dengan sejumlah pejabat membahas nasib ribuan tenaga Non ASN Sidoarjo, Rabu (20/8/2025).

Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin juga hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo tersebut. Bupati Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tidak akan melakukan PHK terhadap tenaga Non ASN yang kemarin gagal ikut tes PPPK. Mereka tetap akan bekerja di instansinya masing-masing. Pemkab Sidoarjo akan mengangkat mereka sebagai PPPK Paruh Waktu. Jumlahnya 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang telah masuk data base BKN.

“Yang kemarin ikut tes dari kategori R3 dan R4, akan kita angkat semua sebagai P3K Paruh Waktu,” tegas Subandi.

Sidoarjo Dipastikan Bupati Subandi Tidak Ada PHK Non-ASN. Namun lanjut bupati, masih ada PR terhadap tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam kategori R3 dan R4. Saat ini masih ada 2.311 orang Non ASN yang tidak masuk kategori tersebut.

Terkait itu, Pemkab Sidoarjo akan mencari alternatif lain terhadap status mereka. Seperti mengalihkan pada skema outsourcing sesuai ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), atau alternatif lainnya.



“Yang tidak kita angkat tidak kita PHK, Cuma kita outsourcing kan, kalau daerah lain ada yang diberhentikan.” ucapnya.

Pengangkatan ini dilakukan juga berdasar kebutuhan Pemkab Sidoarjo. Karena setiap tahun ratusan ASN di Pemkab Sidoarjo memasuki usia pensiun. Pemkab tidak merekrut pegawai baru. Cukup mengambil pegawai non-ASN yang diangkat dari PPPK. Mereka yang sudah menialani pegawai berstatus R3 dan R4. Pengangkatan itu sesuai dengan surat dari BKN agar mengangkat pegawai parowaktu. Sesuai data-data yang sudah masuk ke BKN dan BKD. Juga sesuai dengan kemampuan daerah. Batas belanja 30 persen dari APBD untuk belanja pegawai.

Subandi menegaskan bahwa pengangkatan PPPK ini merupakan tindak lanjut surat BKN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dipastikan tidak ada faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi keputusan pengangkatan PPPK ini. Termasuk, jika ada yang mencoba melakukan hal-hal di luar aturan. Misalnya, melakukan pungutan atau yang lain dengan alasan apa pun dan mengatasnamakan siapa pun. “Kami pastikan tidak ada hal-hal seperti itu. Saya ingin nasib pegawai non-ASN ada kepastian karena mereka sudah lama mengabdikan.” tegasnya.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mendukung penuh kebijakan Pemkab Sidoarjo terhadap nasib tenaga Non ASN yang kemarin gagal tes PPPK. Dipastikannya pihak legislatif mendukung kebijakan pengusulan pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.

Pihaknya juga akan memastikan tidak ada penghapusan atau pengurangan tenaga non-ASN di Kabupaten Sidoarjo. Semua akan tetap bekerja seperti sebelumnya.

“Alhamdulillah teman-teman dari Pemkab dan DPRD kompak untuk memutuskan hal ini. Kita akan mengawalinya. Karena itu terkait dengan nasib ribuan warga Sidoarjo.” katanya.

KILAS DELTA



ANUGER BONDIAN/JAWA POS

LEBIHI PAGU: Para siswa kelas 1 SDN Candipari 2, Porong, usai mengikuti kegiatan belajar, Selasa (19/8). Dinas Dikbud berkirim surat ke Kemendikdasmen terkait kasus sekolah kelebihan murid.

Dinas Dikbud Belum Pastikan Sanksi untuk Kedua Sekolah Kelebihan Murid

SIDOARJO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo belum bisa memastikan sanksi bagi dua sekolah di Porong yaitu SDN Candipari 2 dan SDN Kesambi yang memasukkan murid melebihi pagu.

Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirta Adi mengatakan, pihaknya masih akan berkonsultasi ke Pemkab Sidoarjo dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait perkara tersebut. "Kami sudah bersurat (ke Bupati dan Kemendikdasmen) terkait kasus ini," ujarnya kemarin (20/8).

Tirta belum bisa mengungkapkan apa akan ada sanksi lanjutan kepada kepala sekolah. Meski begitu, Dinas Dikbud Sidoarjo sudah memberikan teguran keras kepada kedua kepala sekolah. "Kami sudah tegur setelah monitoring," katanya.

Ia tidak membantah atau membenarkan adanya dugaan siswa diloloskan oleh kepala sekolah. "Bisa jadi diterima kepek. Kami tahunya ada kelebihan setelah monev dan cek data," katanya. Baginya, yang terpenting kini siswa tersebut bisa tetap belajar meski beberapa harus pindah sekolah. (eza/uzi)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

2.311 Tenaga Honorer Harus Masuk Outsourcing, Bupati Sidoarjo Pastikan Tak Ada PHK Bagi 3.843 Pegawai Non ASN



Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi memastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Termasuk para tenaga Non-ASN Pemkab Sidoarjo yang dinyatakan tidak lolos tes penerimaan PPPK Pemkab Sidoarjo.

Ribuan pekerja ini tidak perlu gusar. Alasannya, karena Bupati Sidoarjo Subandi memastikan mereka semua tetap bekerja di instansinya masing-masing tanpa dihantui pemberhentian.

"Kemarin ada 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang gagal lolos tes PPPK. Seluruhnya akan diangkat Pemkab Sidoarjo sebagai PPPK Paruh Waktu," ujar Bupati Sidoarjo, Subandi usai rapat dengan sejumlah pejabat membahas nasib ribuan tenaga Non ASN Pemkab Sidoarjo, Rabu (20/08/2025).

Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin juga hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo itu.

Subandi menguraikan Pemkab Sidoarjo tidak akan melakukan PHK terhadap tenaga Non ASN yang kemarin gagal ikut tes PPPK. Mereka tetap akan bekerja di instansinya masing-masing. Pemkab Sidoarjo akan mengangkat mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.

"Berdasarkan datanya ada 3.843 orang Non ASN Pemkab Sidoarjo yang masuk data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Yang kemarin ikut tes dari kategori R3 dan R4, akan diangkat semua sebagai P3K Paruh Waktu," jelas Subandi.





Namun demikian, kata Subandi masih ada Pekerjaan Rumah (PR) terhadap tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam kategori R3 dan R4. Saat ini, masih ada 2.311 orang Non ASN yang tidak masuk kategori itu. Untuk PR ribuan honorer ini, Pemkab Sidoarjo akan mencari alternatif lain terhadap status mereka. Seperti mengalihkan pada skema outsourcing sesuai ketentuan peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau alternatif lainnya.

"Untuk yang tidak diangkat juga tidak kita PHK. Nanti hanya kita ikutkan ke outsourcing. Meski di daerah lain ada yang diberhentikan," katanya.

Pengangkatan ini, kata Subandi dilakukan juga berdasar kebutuhan Pemkab Sidoarjo. Alasannya, setiap tahun, ratusan ASN di Pemkab Sidoarjo memasuki usia pensiun. Karena itu, Pemkab Sidoarjo tidak merekrut pegawai baru lagi.

"Cukup mengambil pegawai non-ASN yang diangkat dari PPPK. Mereka yang sudah menialani pegawai berstatus R3 dan R4. Pengangkatan itu berdasarkan surat dari BKN agar mengangkat pegawai paruh waktu. Sesuai data-data yang sudah masuk ke BKN dan BKD serta sesuai dengan kemampuan daerah. Batas belanja 30 persen dari APBD untuk belanja pegawai," tegas mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.

Subandi menguraikan pengangkatan PPPK ini menjadi tindak lanjut surat BKN disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dipastikan tidak ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi keputusan pengangkatan PPPK ini. Termasuk, jika ada yang mencoba melakukan hal-hal di luar peraturan. Misalnya, melakukan pungutan atau yang lainnya dengan alasan apa pun dan mengatasmamakan siapa pun.

"Kami pastikan tidak ada hal-hal seperti itu. Saya ingin nasib pegawai non-ASN ada kepastian karena mereka sudah lama mengabdikan untuk Pemkab Sidoarjo," jelas Subandi.



Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mendukung penuh kebijakan Pemkab Sidoarjo terhadap nasib tenaga Non ASN yang kemarin gagal tes masuk PPPK itu. Menurutnya, pihak legislatif (DPRD Sidoarjo) mendukung kebijakan pengusulan pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu itu.

"Kami juga akan memastikan tidak ada penghapusan (pengurangan) tenaga non-ASN di Kabupaten Sidoarjo. Semua akan tetap bekerja seperti sebelumnya. Alhamdulillah teman-teman dari Pemkab dan DPRD kompak untuk memutuskan hal ini. Kita akan mengawal ini karena berkaitan dengan nasib ribuan warga Sidoarjo," tandasnya. Ary/Waw



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo Subandi Terbitkan SE, Terapkan Pembatasan Jam Malam Bagi Peserta Didik



SIDOARJO, BIDIKNASIONAL.com - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi memberlakukan kebijakan pembatasan jam malam bagi peserta didik melalui Surat Edaran Bupati Nomor 000.1.10/9544/438.6.5/2025 yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2025.

Aturan ini diterapkan sebagai upaya melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan sekaligus menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan kondusif.

Dalam aturan baru ini, peserta didik dilarang melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB. Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang mengikuti kegiatan resmi sekolah, acara keagamaan, kegiatan sosial dengan sepengetahuan orang tua, sedang bersama orang tua, dalam keadaan darurat, maupun atas izin wali.

Beberapa poin tersebut meliputi :

A. Penerapan pembatasan kegiatan peserta didik di luar rumah pada malam hari yaitu mulai pukul 21.00 WIB s.d 04.00 WIB, kecuali:

1. Peserta didik mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi;
2. Peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua/wali;

3. Peserta didik sedang berada di luar rumah bersama orang tua/wali;
4. Kondisi keadaan darurat, bencana, atau keperluan kesehatan mendesak.

Baca Juga: [PHK Sepihak, PT Sreeva Sewu Indonesia Diadukan ke Disnaker Sidoarjo](#)

B. Selama pemberlakuan jam malam, peserta didik tidak dibenarkan:

1. Melakukan aktivitas di luar rumah/tempat tinggal;
2. Berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orang tua/wali;
3. Melakukan aktivitas yang berdampak buruk yang mengarah ke tindak kriminalitas;
4. Mengikuti komunitas yang berpotensi menimbulkan kenakalan remaja, pergaulan bebas,
5. Minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain, serta segala bentuk kekerasan terhadap anak (Komunitas Punk, Gangster, Balap Liar, Napza, dll, dan
6. Berada di lokasi dan komunitas yang berpotensi membahayakan keselamatan anak (Warung Kopi, Warung Internet, Penyedia Game Online, Jalanan, dan sebagainya).

C. Bagi anak yang melanggar ketentuan jam malam akan diberlakukan:

1. Pendekatan persuasif dan edukatif sebagai prioritas utama;
2. Pembinaan oleh petugas terkait dengan melibatkan orang tua/wali;
3. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian Resor Sidoarjo dan instansi terkait untuk kasus yang memerlukan penanganan khusus



Dekat Area Industri, Warga Krian Paling Banyak Terpapar ISPA

SIDOARJO - Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) paling banyak ditemukan di Kecamatan Krian. Salah satu penyebabnya, karena dekat dengan area industri.

Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat, total ada 269.423 kasus tersebar di sejumlah Sidoarjo. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo Danang Abdul Ghani mengatakan, Puskesmas Krian menduduki peringkat pertama dengan 72.625 kasus. "Angkanya jauh lebih besar dibanding wilayah lain. Disusul Ganting 23.139 kasus dan Waru 21.078 kasus," ujarnya kemarin (20/8).

Menurutnya, kasus ISPA di Sidoarjo dipicu polusi udara serta perubahan iklim. Dua faktor itu memperburuk kualitas udara sehingga memicu gejala gangguan pernapasan. Terlebih, lokasi penanganan dari ketiga puskesmas dekat dengan area industri. Polusinya memperburuk kualitas udara.

"ISPA dipicu juga oleh kualitas udara buruk berdampak langsung pada kesehatan masyarakat," jelasnya. Danang mengatakan bahwa para penderita ISPA merupakan kelompok berada dalam kategori produktif 19 hingga 59 tahun. Dinkes mendorong masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai upaya pencegahan. (eza/uzi)

POLUSI: Warga beraktivitas di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Krian, di dekat cerobong pabrik tahu kemarin (20/8). Kualitas udara buruk jadi penyebab tingginya ISPA di Krian.



ANGGER BONDAN/JAWA POS

Penumpang Kereta Api: Rem Blooong!

Commuter Line Baru Bisa Berhenti 4 Km dari Stasiun

KA BABLAS HINGGA DESA SUGIHWARAS

1. KA Commuter Line berangkat dari Stasiun Pasarturi. Dijadwalkan tiba di Stasiun Sidoarjo sebagai titik pemberhentian terakhir pukul 19.14 WIB.
2. KA gagal berhenti di Stasiun Sidoarjo diduga akibat rem blong. KA itu terus melaju sebelum akhirnya bisa berhenti di Desa Sugihwaras, Candi.
3. Beberapa penumpang memilih melanjutkan perjalanan dengan transportasi lain. KA ditarik rangkaian pengganti ke Stasiun Sidoarjo sebelum kemudian dibawa ke Depo Sidotopo.
4. KAI Daop 8 belum memastikan penyebab insiden itu. KA yang bermasalah masih dalam proses pemeriksaan.

Ditulah dari berbagai sumber



LUQMAN ARIF
Manajer Humas
KAI Daop 8

KA sudah diperiksa sebelum beroperasi. Keselamatan dan kenyamanan penumpang selalu menjadi prioritas kami."

SIDOARJO - KA Commuter Line Jenggala gagal berhenti di Stasiun Sidoarjo pada Selasa (19/8) malam. Insiden yang terjadi pukul 19.14 WIB itu diduga akibat rem blong. KA baru berhenti di Desa Sugihwaras, Candi yang jaraknya sekitar empat kilometer.

Latif, salah satu penumpang, mengungkapkan, suasana di dalam kereta sangat mencekam. Lampu KA mendadak mati-menyala menjelang stasiun. "Sudah mau turun. Orang-orang di gerbong depan lari ke belakang. Ada yang teriak rem blong," kata penumpang gerbong tiga itu.

Turun dengan Melompat

KA akhirnya memang tidak berhenti di stasiun yang seharusnya menjadi pemberhentian terakhir tersebut. Latif dan penumpang lain hanya bisa pasrah. Hingga KA ke-

mu - dian

berhenti di petak jalan.

Sutaji, warga di sekitar lokasi KA berhenti, menyebut mayoritas penumpang langsung turun dengan melompat. Beberapa memilih berjalan ke jalan raya mencari angkutan umum. "Lampu di kereta mati-menyala sebelum berhenti," ungkapnya.

Dalami Penyebab

Manajer Humas KAI Daop 8 Luqman Arif secara terpisah menyampaikan, penyebab kejadian itu masih didalami. Yang jelas, pengatur perjalanan kereta api (PPKA) langsung berkoordinasi dengan petugas stasiun sekitar setelah mendapat panggilan darurat dari masinis. "Kondisi seluruh penumpang selamat," ujarnya.

KA itu, lanjutnya, ditarik rangkaian pengganti ke Stasiun Sidoarjo dari titik pemberhentian. Beberapa penumpang memilih melanjutkan perjalanan dengan transportasi lain. "KA sudah diperiksa sebelum beroperasi. Keselamatan dan kenyamanan penumpang selalu menjadi prioritas kami," tandasnya. (edi/uzi)

BERMASALAH:
KA Commuter Line Jenggala baru berhenti di Desa Sugihwaras, Candi, setelah gagal ngerem di Stasiun Sidoarjo pada Selasa (19/8) malam. KA dibawa ke Depo Lokomotif Sidotopo untuk diperiksa.

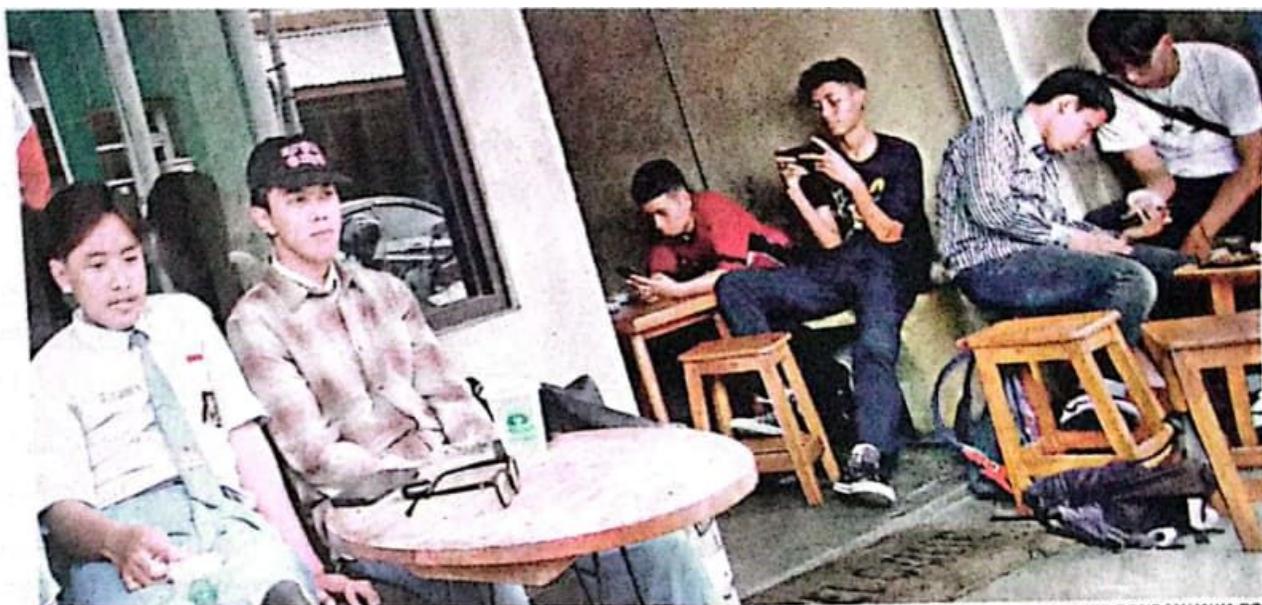


EDI SJ IAHNA POS



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANGGER BONDAN/JAWA POS

DIBATASI: Para siswa nongkrong di sebuah warung kopi Jalan Dr Cipto Mangun Kusumo kemarin (20/8). Pemkab bakal memberlakukan jam malam.

Pelajar Dilarang Keluar Rumah Pukul 21.00–04.00

SIDOARJO - Pelajar di Sidoarjo bakal dibatasi aktivitasnya saat malam hari. Bupati Sidoarjo Subandi resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pembatasan jam malam bagi peserta didik. Aturan jam malam itu ditujukan untuk melindungi anak dari tindak kriminalitas, hingga pergaulan bebas.

Subandi mengatakan pelajar dibatasi aktivitas malam mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB. "Pembatasan ini demi keamanan, kenyamanan, dan perlindungan anak-anak kita," ujarnya kemarin (20/8). Pembatasan ada beberapa penyesuaian jika ada kegiatan resmi sekolah, kegiatan keagamaan, atau berada di luar rumah bersama orang tua.

Dalam SE, Pelajar juga tidak boleh berkumpul di tempat umum tanpa pengawasan orang tua, atau ikut komunitas yang berpotensi menimbulkan kenakalan remaja, hingga berada di lokasi yang rawan seperti warung kopi, warnet, atau penyedia *game online*.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, SE tersebut berlaku dimulai pada pekan ini. "Ini berlaku untuk siswa dari SD sampai SMA/SMK," katanya.

Kasi Ops Satpol PP Sidoarjo Novianto Koesno menambahkan, pihaknya akan mengadakan rapat internal. "Nanti kami *update* lagi terkait penerapannya," ungkapnya. (edi/uzi)

